

KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN SUMEDANG JAWA BARAT

Ai Nunung

Program Studi Administrasi Keuangan DIII
Politeknik Piksi Ganessa, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 301 Bandung.
E-mail : hj0967@yahoo.co.id

ABSTRACT

Landslide natural disaster program that occurred in several areas, especially in Sumedang Regency, this research was made to find out how the local government is responsible for handling landslide natural disasters in Sumedang Regency, West Java Province. The main objective of this study is to determine the capacity of the local government in overcoming landslide natural disasters. which is a very important measurement tool for determining the success of disaster risk reduction in the Sumedang region. This very complex task must be supported by human resources who have high competence in planning, implementing plans, organizing, leadership, supervising or controlling development and so on. Assessment of the capacity of regional governments in managing landslides is one of the parameters in determining the success in anticipating the impact of landslide hydrometeorological disasters. The reference for the capacity assessment in Indonesia is based on Ina RISK's analysis of disaster sites, which are undulating hills at an altitude between 700 and 750 meters above sea level. The slope is steep, and below it is a residential area. The factors that cause ground motion are estimated to be due to the slope of the slope which is rather steep to steep. Not only that, the weathering of the breccias and tuffs that easily release water underneath is a waterproof layer so that it functions as a sliding area. Cliffs that experience landslides are open land without strong rooted vegetation and without slope reinforcement, besides that drainage channels according to the Geological Agency of the Ministry of Energy and Mineral Resources, land movement disasters or landslides in Cimanggung District, Sumedang Regency, West Java Province the upper slopes of the settlement. Landslide disaster management in the area has to be evacuated and must anticipate the potential for further landslides considering that the area is still prone to landslides and high rainfall. According to PVMBG, the capacity of landslides in Sumedang Regency is Grade B, namely 70% -80% of the 88 indications studied. From these results, the main concern of the Landslide Disaster Management Agency was triggered by high rainfall and unstable soil conditions. BNPN increases the provincial BPPD to carry out early warning and preparedness, especially BPPD Sumedang Regency

Key words: Capacity, landslide disas

ABSTRAK

Kejadian bencana alam longsor yang terjadi di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Sumedang, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam longsor di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor. yang merupakan alat ukur yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan pengurangan risiko bencana di wilayah Sumedang. Tugas yang sangat kompleks ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan rencana, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan atau pengendalian pembangunan dan sebagainya. Penilaian kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola longsor merupakan salah satu parameter dalam menentukan keberhasilan dalam mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi longsor. Acuan penilaian kapasitas di Indonesia didasarkan pada analisis Ina RISK terhadap lokasi bencana yang berupa perbukitan bergelombang pada ketinggian antara 700 dan 750 meter di atas permukaan laut. Kemiringannya terjal, dan di bawahnya terdapat pemukiman penduduk. Faktor penyebab terjadinya gerakan tanah diperkirakan karena kemiringan lereng yang agak curam sampai curam. Tidak hanya itu, pelapukan breksi dan tuf yang mudah mengeluarkan air di bawahnya merupakan lapisan kedap air sehingga berfungsi sebagai daerah luncur. Tebing yang mengalami longsor merupakan lahan terbuka tanpa vegetasi berakar kuat dan tanpa perkuatan lereng, selain itu saluran drainase menurut Badan Geologi Kementerian ESDM, bencana gerakan tanah atau longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat lereng atas pemukiman. Penanggulangan bencana tanah longsor di kawasan tersebut harus dievakuasi dan harus mengantisipasi potensi longsor lebih lanjut mengingat kawasan tersebut masih rawan longsor dan curah hujan tinggi. Menurut PVMBG, kapasitas longsor di Kabupaten Sumedang adalah Grade B yaitu 70%-80% dari 88 indikasi yang diteliti. Dari hasil tersebut, perhatian utama Badan Penanggulangan Bencana Longsor dipicu oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang tidak stabil. BNPB tingkatkan BPPD provinsi untuk melakukan peringatan dini dan kesiapsiagaan khususnya BPPD Kabupaten Sumedang

Kata kunci : Kapasitas, bencana tanah longsor

PENDAUULUAN

Sumedang termasuk daerah di Jawa Barat Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan buah Dua (6,91 %) dari total luas Kabupaten Sumedang, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kecamatan Cisarua (1.145). Batas Administratif kabupaten Sumedang tersebut secara visualisasi wilayah administratif sebelah utara kabupaten Indramayu, sebelah selatan Kabupaten Garut dan kabupaten Bandung, Sebelah Barat Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang, sebelah timur kabupaten Sumedang. Dengan potensi bencana longsor cukup tinggi. Dari 26 Kecamatan yang ada , 23 diantaranya termasuk dalam wilayah rawan longsor. Rawan longsor di 23 Kecamatan berdasarkan indeks resiko bencana, sumedang termasuk dalam urutan 10 di Jawa Barat dengan mempunyai resiko tinggi bencana. Potensi yang terjadi di Sumedang adalah longsor atau pergerakan tanah. Pada bulan Januari 2021 telah terjadi 16 bencana dan 11 diantaranya adalah tanah longsor. Selama Januari ini saja kejadian bencana sebanyak 16 Kejadian yang terbanyak terjadi dari kejadian itu longsor atau pergerakan tanah sebanyak 11 kali. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor yang terjadi di Desa Cihanjuang, kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang Jawa Barat,

menewaskan 13 orang, selain itu ada 3 orang luka berat, 22 luka ringan dan 27 orang lainnya masih dalam pencarian. Diantara tim SAR gabungan yang lolos dari maut pasca longsor ada 1 orang dan empat orang jurnalis televisi yang berada dilokasi kejadian . Kapasitas pemerintah Daerah merupakan Instansi yang sangat penting untuk menanggulangi dan mengatasi serta menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko Bencana Tanah Longsor. Salah satu cara yang bisa diterapkan untuk memperkirakan bencana tanah longsor adalah menggunakan aplikasi yang mampu menginventarisasi lokasi terdampak menggunakan sistem informasi geografis yang memiliki kemampuan untuk memasukkan, menyimpan, menanggapi kembali, mengolah menganalisa dan menghasilkan data berreferensi geografis. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui fenomena kejadian tanah longsor, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian longsor, faktor-faktor dominan, mekanisme kejadian, risiko masyarakat yang berada di sekitar lokasi longsor serta rekomendasi pengurangan risiko bencana tanah longsor yang diperlukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menjabarkan Kapasitas Pemerintah daerah Daerah dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor. Penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu koordinasi dengan instansi terkait yaitu Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPD), BPPD kabupaten Sumedang, Badan meteorology Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta lembaga yang terkait lainnya, peneliti telah menentukan tempat atau informan yang dituju, dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang

HASIL DAN PEMBAHASA

Salah satu metode pengumpulan data kapasitas Pemerinyah daerah kabupaten

terdampak bencana longsor, Desa dan kecamatan setempat , serta Koramil setempat.

Lokasi tanah longsor di desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Jawa Barat , penelitian ini dilakukan pada Bulan januari 2021 mulai dua minggu setelah pasca longsor. penelitian ini adalah kapasitas pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana alam tanah longsor , perlu dibangun peningkatankesiapsiagaan masyarakat, pemasangan sistem peringatan dini longsor serta untuk jangka panjang , adalah relokasi pada daerah yang aman jika memang kondisi semakin parah .

Sumedang dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dengan metode kuantitatif,

untuk mendapatkan data dengan menggunakan hasil perhitungan secara rata-rata prosentase masing-masing indikator.

Nilai kemampuan (dalam persentase) dihitung dengan :

membandingkan score yang didapat dengan maximal nilai . Perhitungan nilai dan jenis kemampuan adalah sebagai berikut

Tabel 1 Bobot Hasil penelitian kapasitas emerintahan Daerah

BOBOT	GRADE	KLARIFIKASI
90 %	A	Kapasitas Pemerintah daerah dalam penanggulangan Bencana alam tanah longsor
80 % - 90 %	B	Kapasitas Pemerintah daerah dalam penanggulangan Bencana alam tanah longsor
70 % - 80 %	C	Kapasitas Pemerintah daerah dalam penanggulangan Bencana alam tanah longsor
60 % - 70 %	D	Kapasitas Pemerintah daerah dalam penanggulangan Bencana alam tanah longsor
Di Bawah 60 %	E	Kapasitas Pemerintah daerah dalam penanggulangan Bencana alam tanah longsor

Sumber : Data Hasil Penelitian di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Bobot Prosentase dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan membandingkan 5 (lima) bobot rencana resiko bencana, maka prosentase ini diambil supaya alat ukur Aksi Hangyo (KAH) dan mempunyai hasil yang akan dicapai mengutamakan :

kesatu untuk membuktikan supaya mengurangi risiko bencana alam tanah longsor memenuhi salah satu nilai unggulan nasional dan daerah memakai cara yang paling bawah di dalam lembaga yang kokoh supaya tercapai sesuai rencana.

Untuk pelaksanaan yang pertama ini, mempunyai empat yang mejadi alat ukur sebanyak 16 yang akan di carikan : Alat ukur pertama yaitu rancangan legal supaya memenuhi persyaratan untuk mengatasi rawan tanah longsor. Alat ukur yang kedua yaitu disiapkan petugas yang memenuhi syarat untuk membagikan diutamakan dalam rencana meminimalkan risiko bencana tanah longsor untuk seluruh hirarkhi

Bobot hasil penelitian membuah hasil penilaian yaitu 70,80%, merupakan grade C, memberikan pengertian bahwa keberadaan daerah untuk mengatasi akibat Bencana alam tanah longsor merupakan salah satu yang diutamakan untuk tingkat Nasional dan daerah sebagai fondasi suatu lembaga yang Kokoh dengan maksud bisa tercapai mencukupi dalam pencapaiannya..

Untuk meghasilkan bobot tersebut yang sangat berperan sekali adalah tercapainya sumber daya yang berhubungan dengan PRB pada BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) yang memenuhi untuk mencapai hasil yang terbaik, baik dilihat dari kualitas dan kuantitas. Di lain sebab, tidak adanya pengawasan yang optimal oleh penduduk setempat untuk mengkoordinir anggaran biaya mengatasi bencana alam tanah longsor, tidak tersedianya lembaga yang mempunyai tugas untuk memberikan semangat untuk mengatasi, mengurangi akibat dari bencana alam tanah longsor di daerah dimana beberapa organisasi yang sangat berperan diantaranya pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat Dinas kesehatan setempat, pelajar dan mahasiswa serta tokoh masyarakat dan media sosial dan informasi. Yang diutamakan untuk

instansi Negara. Alat ukur ke tiga yaitu adaya keeratan hubungan dan sumbangsih serta pemusatan hubungan informasi dengan cara pelimpahan kekuasaan serta kekuatan manusia dan lingkungannya di setiap daerah. Alat ukur yang keempat yaitu dijalankannya komunikasi antara daerah satu dengan yang lainnya diagendakan supaya mengatasi risiko bencana alam tanah longsor.

bagian kedua yaitu diadakannya analisa akibat bencana alam tanah longsor di daerah didasarkan fakta akibat dan kerentanan supaya mancangkup akibat yang diutamakan bagian bagian terpenting dari daerah tersebut. Untuk mengerjakan analisa yang ke dua ini, ada empat indikasi dengan jumlah keseluruhan 16 pertanyaan. Indikasi yang pertama disediakan pengamatan risiko terhadap bencana alam tanah longsor daerah dari sumber akibat dan keretakan terutaman yaitu akibat yang sangat penting untuk daerah tersebut . bagian kedua adalah diadakannya jaringan yang bisa menjaga, menyimpan dan menyampaikan seluruh hasil perolehan dari bencana tersebut dan keretakan-keretakan yang paling penting . indikasi yang ke tiga yaitu disiapkan jaringan waspada yang siap bekerja untuk jaringan besar dengan tinjauan yang sangat panjang kepada seluruh lapisan masyarakat luas.. indikasi yang keempat yaitu dievaluasi akibat bencana alam tanah longsor di daerah dengan memperhitungkan akibat –akibat antara daerah yang satu dengan yang lainnya supaya menumbuhkan serta saling bekerja antara yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut untuk meminimalisir dari akibat bencana alam longsor tersebut

Dari bobot grade diperoleh data yaitu 93,75%, merupakan hasil bobot A, dimana hasilnya bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan dan menyediakan analisis akibat Bencana Daerah yang diutamakan perolehan hasil, akibat serta keretakan supaya mencakup dan mengantisipasi bagian-bagian yang diutamakan terutama daerah yang bagus sekali. Semua hasil penelitian ini, Bisa diperoleh data dengan disiapkan data yang sangat penting mengenai penganalisaan akibat resiko bencana alam Kabupaten Sumedang dengan memenuhi memakai data peta resiko Bencana. Bencana tanah longsor harus di barukan setiap saat, disamping itu juga diadakannya sistem pemberitahuan dan kesiap siagaan untuk daerah yang sering terjadi bencana alam tanah longsor.. Alat pemberitahuan untuk waktu sekarang di tempatkan alat pendektiksi benaca alam longsong di setiap tempat. Masalah yang muncul dikalangan Masyarakat, yaitu tidak mau dan kurang mengetahui untuk dipasang alat deteksi peringatan dini dimana alat ini merupakan suatu jaringan peringatan longsor atau *Landslide Early Warning System* (LEWS) Kabupaten Sumedang (Rahman, 2015). Yang diutamakan bobot ketiga yaitu terbuktinya digunakan ilmu pengetahuan, gagasan baru dan pegetahuan formal supaya bisa memperoleh hasil kapasitas dan pengetahuan yang luas dan termonitor dari bencana alam daerah tanah longsor di semua tingkat. Untuk melaksanakan bobot yang ketiga ini, ada empat hal yang penting dari seluruh pertanyaan yang diajukan.. indikasi yang pertama yaitu apakah ada pemberitahuan yang pasti tentang bencana alam tanah longsor dan bisakah untuk diambil datanya di semua bagian bagi semua yang memerlukan (dengan jaringan, perluasan sistem untuk supaya bisa disebar luaskani, dst).

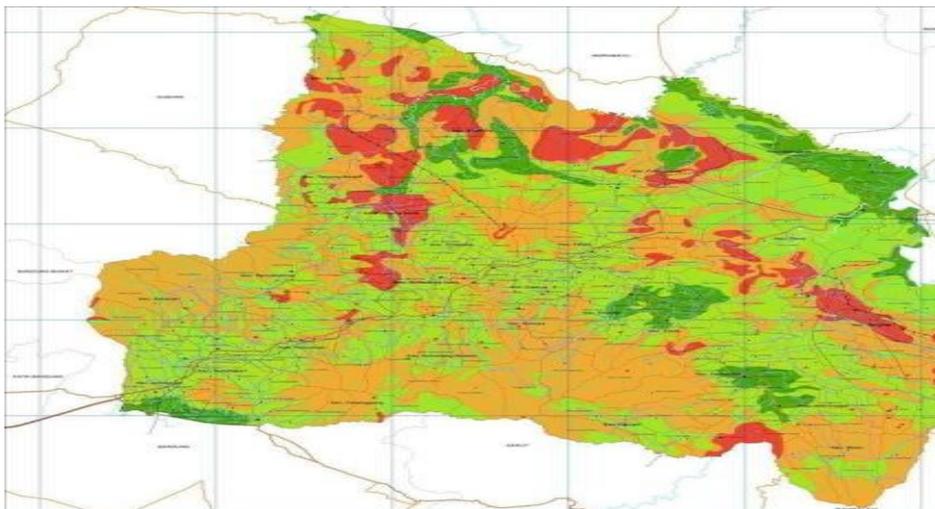
indikasi yang kedua yaitu rencana pendidikan di sekolah, bahan untuk menambah pegetahuan dan workshop yang pasti mengenai draf- draf serta pelaksanaan di lapangan tentang pengantisipasi akibat bencana alam tanah longsor dan cara untuk mengatasinya. Indikasi yang ke tiga yaitu disediakan metode untuk penelitian supaya bisa dianalisa akibat berbagai bencana alam tanah longsor serta analisis kegunaan dari anggaran (*cost benefit analysis*) yang selalu diperluas dari hasil tersebut. indikasi yang keempat yaitu di gunakan cara untuk mempunyai keinginan dari seluruh pemangku yang berkepenting untuk menghasilkan dan di terapkan culture tahan bencana alam tanah longsor yang bisa menembus masyarakat secara umum baik di daerah yang tidak terkena dampak longsor maupun daerah yang terkena dampak alam tanah longsor Bobot dari Klarifikasi menghasilkan angka 56,25 %, nilai ini bisa dimasukkan dalam kategori D, dalam hal ini mempunyai penegertian bahwa kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor menggunakan ilmu pengetahuan gagasan dan pendidikan formal bisa digunakan untuk meningkatkan serta membangun kapasitas dan culture yang stabil pada semua tingkatan bencana yaitu tidak hanya mencukupi saja sehingga perlu ditingkatkan kemampuan. semua hasil penelitian bisa ditinjau apakah ada pendidikan tentang mengurangi risiko bencana alam tanah longsor di beberapa lembaga pendidikan formal di areal wilayah rawan bencana. Disamping itu juga belum adanya penggunaan hasil penelitian yang bisa untuk memonitoring ancaman bencana dan mengurangi kerentanan daerah rawan bencana terhadap risiko multi bencana

Semua ini sangat diutamakan untuk mengetes akibat dari bencana alam tanah longsor yang sering terjadi. Sesuatu yang perlu diperhatikan serta mendapat dukungan serta perhatian supaya ada peningkatan yaitu metode yang bisa menghitung hasil yang strategi dan merencanakan kepada masyarakat umum serta ditempatkan atau dilaksanakan di wilayah rawan bencana alam tanah longsor di Kabupaten Sumedang supaya ada peningkatan dan mempraktekkan budaya meminimalisasi dan mengurangi resiko bencana alam tanah longsor. (Mubekti, 2011) mendasar dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor, untuk melaksanakan grade yang keempat ini, sebanyak 6 indikasi dengan total 24 pertanyaan. Indikasi yang pertama yaitu dengan cara mengurangi apa saja yang menjadi resiko bencana dimana hal itu menjadikan sebagai unggulan dari apa yang akan dicapai dari kebijakan yang telah dibuat dan merencanakan apa saja yang ada hubungannya dengan factor lingkungan setempat, dimana didalamnya ada sumber daya alam yang harus dilestarikan, penggunaan lahan dan menyesuaikan terhadap lingkungan setempat dan iklim

dari daerah tersebut. Indikasi yang kedua yaitu perencanaan apa saja dan kebijakan kebijakan yang akan ditempuh untuk melaksanakan perubahan di bidang sosial untuk dijalankan serta meminimalkan akibat kerentanan terikat tempat yang paling utama terkena dampak bahaya dari bencana tersebut. Indikasi yang ke tiga yaitu merencanakan dan memberikan kebijakan pada sektor. bagian ekonomi dan industrial supaya melaksanakannya hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan kerentanan pada sektor ekonomi. Indikasi yang keempat yaitu merencanakan serta mengolah tempat tinggal penduduk setempat supaya mengurangi akibat risiko dari bencana tersebut terutama harus mengutamakan persyaratan apabila akan mendirikan bangunan terutama untuk pembangunan perumahan komplek atau apartemen dimana pemerintah setempat harus menegaskan supaya memenuhi syarat izin mendirikan bangunan (IMB). Selanjutnya untuk indikasi yang kelima terakhir yaitu melaksanakan bagaimana supaya mengurangi resiko bencana alam tanah longsor dengan dimasukkannya proses rehabilitasi dan pemulihan akibat atau pasca bencana supaya stabil kembali

yang terakhir yaitu indikasi yang keenam yaitu tersedianya langkah apa saja yang akan dilaksanakan untuk memberikan penilaian akibat dari dampak resiko bencana alam tanah longsor serta mengawasi terhadap pembangunan proyek proyek yang berskala besar terutama untuk infrastruktur pembangunan proyek tersebut. Grade yang dinilai dari bobot ini yaitu indikasi dimana hasil yang diutamakan senilai 58,33%, untuk nilai tersebut termasuk dalam Grade D, memberikan arti bahwa kapasitas daerah dalam menanggulangi akibat dari bencana alam tanah longsor kurang, hal ini diperlukan adanya kesiapan siaga dan diupayakan supaya ada kemajuan untuk meningkatkan kemampuan yang lebih baik lagi untuk mengurangi hal hal yang menjadi factor-faktor resiko dari bencana tersebut. Hasil penelitian ini bisa di analisis serta dipublikasikan sehingga tidak menimbulkan unjuk rasa di bidang sosial terutama program program jaringan pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan dan perumahan, fasilitas kesehatan bagi masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, implementasi kebijakan penanganan perekonomian masyarakat, untuk menekan terjadinya pengelompokan masyarakat miskin pasca bencana alam tanah longsor terutama dibentuknya asuransi infrastruktur dan asuransi asset penduduk serta untuk tujuan meminimalisasikan kerenggangan masyarakat dari seluruh

pemangku kepentingan dimana masalah tersebut sudah termasuk di dalam kebijakan-kebijakan di dalam program pembangunan sosial. Masalah ini juga diperkuat harus ada rencana yang matang untuk mengukur dan mengarahkan serta meningkatkan kapasitas komunitas untuk memperbaiki di bidang perekonomian dan dengan tidak adanya hasil dari bidang industri dimana tujuan tersebut di atas dengan maksud untuk mengurangi masalah serta resiko akibat pasca bencana alam tanah longsor. Selain untuk meningkatkan perekonomian dan industri maka diperlukan adanya pengawasan dari daerah setempat untuk mengurangi masalah bencana alam tanah longsor supaya tidak mengalami kendala dan adanya tindakan dari aparat setempat terhadap pemukiman penduduk yang tidak memenuhi berdasarkan perencanaan penggunaan lahan pemukiman dan ijin mendirikan bangunan dari Dinas pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu bilamana akan ada perluasan pembangunan harus memakai analisis kemungkinan akibat dari resiko bencana alam tanah longsor untuk pembangunan proyek-proyeknya. Hal-hal yang harus diperhatikan bagaimana mengatasi pengentasan kemiskinan, penyediaan perumahan bagi penduduk yang memerlukannya, sumber air yang diperlukan dan energy bagi pembangunan infrastruktur. Untuk memonitor masalah tersebut bisa diperjelas dengan dokumen Rencana Tata Ruang wilayah dari kabupaten sumedang untuk tahun 2020 sampai tahun 2021



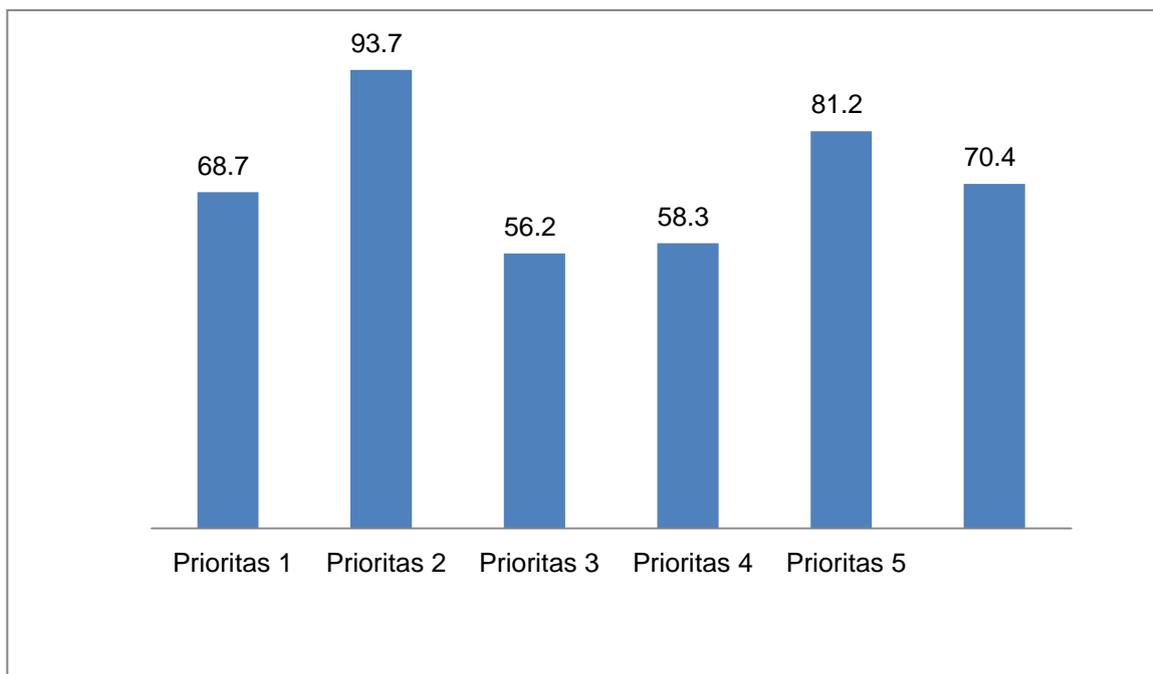
Sumber :RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2021

Berdasarkan peta resiko bencana alam tanah longsor maka akan diketahui klasifikasi mengenai informasi yang bisa dipertanggung jawabkan selama masa tanggap darurat terhadap bencana. Untuk mengutamakan yaitu dengan memperkuat kesiapan dan waspada terhadap bencana alam tanah longsor untuk supaya menanggapi secara efektif terhadap seluruh lapisan masyarakat, aparat dan instansi yang berwenang mengurus masalah bencana ini. Didalam melaksanakan prioritas yang ke empat maka diperlukan adanya 4 indikasi yang bisa menjawab dari 16 pertanyaan yang diajukan indikasi pertama yaitu harus disediakan kebijakan yang bisa mendukung untuk menentukan

keberhasilan pengurangan resiko bencana alam tanah longsor. Selain itu diperlukan kapasitas teknis dari lembaga untuk memberikan arah kebijakan di dalam pembangunan kapasitas serta bagaimana prosedur yang diperlukan untuk bisa menangani kasus emergency didalam menanggapi bencana yang sangat kompleks serta upaya upaya yang komprehensif untuk menilai kapasitas daerah untuk mengurangi resiko bencana dan melaksanakannya. Dalam kegiatan pencapaian indikasi yang kedua yaitu dibuatkan suatu perencanaan kontinjensi untuk bencana alam tanah longsor yang sangat potensial serta sering terjadi dan selalu waspada bagi semua aparat pemerintah yang berwenang.

program yang harus diadakan yaitu memberikan pelatihan secara regular dengan tujuan untuk memberikan penilaiann dan memperluas serta menganalisis dan menyediakan program tanggap darurat terhadap bencana. Kegiatan dari indikasi yang ketiga yaitu disediakannya spare keuangan dan data dari bagian logistic yang sangat baik sehingga dapat memberikan arahan yang sangat tepat untuk memulihkan akibat dari bencana alam longsor tersebut. Yang terakhi yang sangat dipelukan yaitu indikasi keempat harus disediakan proses yang akurat dan bisa berperan untuk bisa memonitoring pelaksanaan program tersebut. Dari hasil penelitian serta analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dari prioritas ini adalah 81,25 % sehingga bisa

dimasukan ke dalam kategori A, untuk nilai ini termasuk sangat baik. Evaluasi bisa di perlihatkan dengan adanya suatu sistem yang mana sistem ini merupakan komando untuk mengatasi tanggap darurat yang disinkronkan dengan BPBD serta pemerintah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Sistem informasi yang berfungsi untuk penanganan bencana alam tanah longsor provinsi Jawa Barat. Sistem pendukung Informasi diperkuat dengan menyajikan mekanisme dengan maksud untuk mengadakan penggalangan berupa bantuan dari pihak lain pada saat terjadi bencana alam. Seperti terjadi bencana alam longsor di kelurahan cilipung yang terjadi pada tanggal 23 pebruari 2019



Gambar 2 Klasifikasi prioritas Bencana alam tanah longsor

Sumber : hasil penelitian bulan Januari 2021

Dilihat dari tabel tersebut diatas maka secara keseluruhan , didapat suatu penilaian tentang kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor di kabupaten Sumedang serta cara penanggulangannya sudah mencapai 70,45 %. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat dari hasil tersebut bahwa kapasitas Pemerintah setempat sudah mempengaruhi dan menggerakkan perubahan di berbagai tingkatan serta sudah termasuk kategori B, dimana kapasitas daerah kabupaten Sumedang sudah memperkuat kemampuan sehingga sudah ada perubahan terhadap lingkungannya dan penyelenggaraan penanggulangan terhadap bencana sudah baik. Pengamatan curah hujan sangat diperlukan karena curah hujan merupakan salah satu pemicu terjadinya bencana alam tanah longsor, bahwa nilai Upaya mitigasi pada wilayah tanah longsor salah satunya dengan upaya mengurangi volume air hujan yang masuk ke dalam profil tanah (Susanti et.al 2017). Kekuatan suatu bangsa dalam menghadapi bencana tergantung kepada sikap dan perilaku dari bangsa tersebut, dimana kemampuan bangsa didalam mempertahankan dan memelihara lingkungannya serta keuletan bangsa tersebut menjadi suatu tujuan yang harus tetap dilestarikan. Untuk mempertahankan tanah air , kita tidak bisa tinggal diam diri tetapi harus siap untuk menghadapi tantangan dari luar baik itu berupa bencana maupun tantangan dari Negara lain. Disamping tantangan kita juga pasti menghadapi yang namanya hambatan serta gangguan dari alam yang berupa banjir, Longsor maupun angin beliuang. Semuanya ini dapat dilaksanakan dengan adanya pembangunan manusia serta pemberdayaan

sehingga menjadikan masyarakat tersebut tangguh terhadap semua bencana baik didaerahnya sendiri maupun dilingkungannya.

DESTANA merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Pelaksanaan pembentukan desa tangguh bencana dilaksanakan melalui

pertemuan koordinasi teknik untuk menghasilkan dokumen dokumen seperti

1. Pembentukan forum pengurangan resiko bencana tingkat desa yang terdiri dari berbagai unsur di desa.
2. Pengkajian ancaman bencana, kapasitas dan kerentanan desa
3. Penyusunan rencana penanggulangan bencana desa

meminimalisir resiko bencana. Masyarakat tangguh bencana yaitu masyarakat yang tidak hanya berpangku tangan menunggu inisiasi pemerintah dalam hal edukasi kesiap siagaan bencana. Usaha mengurangi dampak bencana bisa mulai dilakukan dengan megedukasi diri sendiri dan orang terdekat, setelah hal itu dilakukan edukasi masyarakat sekitar juga perlu dilakukan. Karena partisipasi aktif masyarakat dalam hal tanggap bencana terbukti berperan penting dalam mengurangi kerugian akibat bencana . Kita harus mulai terbiasa hidup berdampingan dengan bencana, dengan menjadi masyarakat yang tangguh dan siap siaga akan bencana. Berbagai usaha yang dilakukan

Salah satunya dengan mengedukasikan diri dan orang sekitar agar mereka lebih memahami konsekuensi yang akan dihadapi. Desa tangguh bencana alam tanah longsor di kabupaten Sumedang yang paling rawan saat ini serta masuk ke level madya, yaitu wilayah Cihanjuang, wilayah Sukadana, Wilayah Cilipung, Padahal Kabupaten Sumedang memiliki 26 Kecamatan yang ada, 23 diantaranya termasuk dalam wilayah bencana longsor. Hal ini merupakan pondasi dari upaya mitigasi bencana, karena bencana tidak dapat kita hindari namun dampaknya dapat meminimalisir

SIMPULAN

Berbagai cara dan strategi telah ditempuh oleh pemerintah daerah sumedang dalam meminimalisir bencana. Berdasarkan uraian diatas maka kapasitas Kabupaten Sumedang didalam melaksanakan program penanggulangan bencana alam tanah longsor hasil dari seluruhnya setelah dianalisis terdapat 88 indikator , dimana grade yang diperoleh yaitu 70,45 %. Berdasarkan hasil tersebut maka kapasitas Pemerintah daerah dalam penanganagn bencana alam tanah longsor di kabupaten Sumedang mencapai bobot 70,45%. Apabila dilihat dari hasil tersebut maka Kapasitas Di daerah kabupaten sumedang termasuk dalam kategori grade B, yang berarti kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik. Hal yang masih menjadi perhatian utama adalah perlu melakukan kesiap siagaan masyarakat desa tangguh bencana.

Kecamatan Cimanggung Kabupaten sumedang harus sudah mengetahui secara alamiah tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana dan kemana harus menyelamatkan diri. Rencana tanggap darurat dalam menghadapi bencana harus mengadakan sosialisasi untuk mengitimagasi bencana. Sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan serta pembuatan pemukiman di daerah rawan bencana harus berdasarkan ketentuan yang di setujui oleh pemerintah.. Sosialisasi ini menjadi penting karena masih banyak pemukiman yang berada di daerah rawan dengan melihat peta rawan bencana. Perlu adanya kolaborasi dengan Taruna Siaga Bencana

(TAGANA) yang telah terbentuk pada masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik 2014.
Sumedang Dalam Angka
2014.

Sumedang:

BPS Kabupaten Sumedang.

Mubekti, M. (2011). Mitigasi Daerah Rawan Tanah Longsor Menggunakan Teknik Pemodelan Sistem Informasi Geografis; Studi Kasus: Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 9(2).

Rahman, A. Z. (2015). Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sumedang. GEMA PUBLICA, 1(01).

Sipaung S.B (2014) .
Pengembangan
Model
Persamaan Empiris Dalam
Memprediksi
Terjadi
nya Longsor di daerah
aliran sungai(DAS)
Citarum (jawa barat).
Berbasis Data satelit
TRMM.

Susanti P.d (2017) Analisis Kerentanan Tanah longsor Sebagai dasar Mitigasi Di Kabupaten Banjarnegara

